BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya penyelenggaraan pemerintah, Republik Indonesia yang terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam menata pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah.

Untuk melaksanakan pemerintahannya, daerah berhak meminta pungutan kepada masyarakat. Menurut UUD 1945 perpajakan sebagai perwujudan kenegaraan. Dijelaskan bahwa pajak dan pungutan-pungutan lain yang dibebankan kepada rakyat bersifat memaksa, yang sudah di atur dengan Undang-Undang. Jadi, retribusi daerah dan pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang. Dengan hal ini, pajak dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diperbarui dengan UU No.34 Tahun 2000 dan dikukuhkan kembali menjadi UU No. 28 Tahun 2009.

Otonomi daerah yaitu hak dalam mengatur maupun mengurus rumah tangga daerahnya sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang. Adapun tujuan otonomi daerah adalah berorientasi kepada pembangunan yang bertujuan dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah harus dituntut

untuk dapat mendistribusikan hasil dari pajak dan retribusi daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur keuangan daerah agar bisa memperdayakan potensi perekonomian daerah dan menggali pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah guna mengola dan memakai keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan di daerahnya, agar meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Dan lain-lain yang sah

Pajak Daerah yaitu suatu kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi/badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan dapat diperuntukkan guna keperluan daerah yang dibuat untuk kemakmuran rakyat.

Adapun penerimaan pajak daerah yang diterima dari pajak propinsi yang terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Pajak Rokok. Sedangkan pajak di kabupaten/kota antara lain, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan bagi daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi/badan. Kedua pengertian tersebut termuat dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga termasuk komponen penting didalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah bisa dikelompokkan kedalam dua jenis retribusi antara lain retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi Jasa Umum antara lain, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi jasa usaha antara lain Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi

Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa, Retribusi Rumah Pemotongan Hewan, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Sendiri. Jenis Retribusi perizinan tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Proyek.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 13 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Umit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plane*), Rumah Potong Hewan ialah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang dipakai untuk tempat pemotongan hewan yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat. Dan ruminansia besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba. Rumah Potong Hewan termasuk instansi di bawah naungan pemerintah dalam bidang jasa pemotongan hewan. Dengan adanya jasa potong hewan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan melalui retribusi menjadi lebih meningkat.

Retribusi Rumah Potong Hewan diharapkan dapat memberikan kontribusi retribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Jombang diatur dalam PERDA Kabupaten Jombang No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan. Retribusi Rumah Potong Hewan yang kemudian disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah yang digunakan untuk pembayaran

atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan pelayanan pemeriksaan, kesehatan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat 4 Rumah Potong Hewan di Kabupaten Jombang antara lain Rumah Potong Hewan Candi Mulyo Kecamatan Jombang, Rumah Potong Hewan Kecamatan Mojoagung, Rumah Potong Hewan Kecamatan Ngoro dan Rumah Potong Hewan Kecamatan Ploso. Dimana penelitian ini meneliti retribusi Rumah Potong Hewan yang diharapkan retribusi dari jasa usahanya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Berdasarkan gambaran umum obyek diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain :

Bagaimana kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur bagi mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang pada khususnya dan seluruh universitas pada umumnya, dan bisa menjadi sebagai informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.